NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

DINAMIKA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA: STUDI KUALITATIF PENGARUH SISTEM KEKERABATAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN

Sri Liawati[1], Dwi Suci Widiastuti[2]
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Subang
sriliawati@steinusubang.ac.id[1], dwisuciwidiastuti@steinusubang.ac.id[2]

ABSTRACT.

This study examines the presence of kinship ties in the composition of Tanjungtiga village officials and clarifies what can be concluded about appointments and service performance. It uses a qualitative descriptive approach based on one verbal account from a former village head, which is presented descriptively. The account indicates that kinship is present in official positions: the village secretary was identified as the village head's child, while the treasurer was identified as the village head's niece or nephew; the former village head also stated that many relatives, including the head's child, became village officials. These facts establish a family connection within the composition of village officials but do not explain selection procedures, appointment criteria, task allocation, or accountability. The presence of relatives therefore does not demonstrate that appointments involved informal selection, violated regulations, or served family interests. Nor does the account provide residents' experiences or descriptions of service practices that could establish the quality of task performance, communication, responsiveness, or treatment of residents. Accordingly, neither the direction nor the impact of kinship on service performance can be determined; kinship is identified only as a social context of village governance. The study's conceptual contribution is to distinguish family relationships, appointment mechanisms, and service practices as connected dimensions that nevertheless require separate evidence. Kinship is relevant to understanding the composition of village officials, while assessments of appointment processes and service quality should rely on direct evidence about procedures and residents' experiences.

Keywords: kinship, village official appointments, service performance.

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan menelaah keberadaan hubungan kekerabatan dalam susunan perangkat Desa Tanjungtiga serta memahami batas kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengangkatan dan kinerja pelayanan. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif, bertumpu pada satu keterangan verbal mantan kepala desa, dan menyajikan pembacaan deskriptif atas keterangan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa kekerabatan hadir dalam susunan jabatan: sekretaris desa

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

disebut sebagai anak kepala desa, sedangkan bendahara disebut sebagai keponakannya; mantan kepala desa juga menyatakan bahwa banyak kerabat, termasuk anaknya, menjadi perangkat desa. Fakta ini menegaskan keterhubungan keluarga dengan susunan perangkat, tetapi tidak menjelaskan tahapan seleksi, dasar pemilihan, pembagian tugas, atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, keberadaan kerabat tidak membuktikan bahwa pengangkatan berlangsung melalui seleksi informal, melanggar ketentuan, atau didasarkan pada kepentingan keluarga. Keterangan yang sama juga tidak memuat pengalaman warga ataupun perilaku pelayanan yang dapat menunjukkan mutu pelaksanaan tugas, komunikasi, ketanggapan, dan perlakuan terhadap warga. Karena itu, arah maupun dampak kekerabatan terhadap kinerja pelayanan tidak dapat ditetapkan; hubungan tersebut hanya teridentifikasi sebagai konteks sosial pemerintahan desa. Kontribusi konseptual kajian ini ialah membedakan secara tegas hubungan keluarga, mekanisme pengangkatan, dan praktik pelayanan sebagai aspek yang saling berkaitan tetapi memerlukan bukti tersendiri. Kesimpulannya, kekerabatan relevan sebagai konteks untuk memahami susunan perangkat, sedangkan penilaian atas proses pengangkatan dan mutu pelayanan perlu bertumpu pada bukti langsung mengenai prosedur serta pengalaman warga.

Kata kunci: kekerabatan, pengangkatan perangkat desa, kinerja pelayanan.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa menjadi ruang pelayanan publik yang dekat dengan kehidupan warga sekaligus arena pengelolaan kewenangan dan sumber daya manusia. Pengangkatan perangkat desa menentukan siapa yang menjalankan administrasi, menyampaikan informasi, dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Proses tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga dapat dipengaruhi hubungan sosial yang telah terbentuk di lingkungan desa. Di Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, sekretaris desa merupakan anak kepala desa, sedangkan bendahara desa merupakan keponakannya. Susunan kekerabatan ini menjadi fakta kontekstual yang perlu ditelaah secara hati-hati, bukan bukti otomatis adanya pelanggaran atau buruknya pelayanan. Kajian terhadap proses pengangkatan kerabat dalam struktur desa diperlukan untuk memahami bagaimana hubungan keluarga berkelindan dengan praktik pemerintahan desa.

Muhi (2024) menemukan bahwa rekrutmen perangkat desa kerap dipengaruhi faktor politik dan kepentingan personal kepala desa, serta dapat mengabaikan peraturan, prosedur, kualitas, kompetensi, dan transparansi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan personal dapat membentuk proses pengisian jabatan, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana hubungan itu dialami dalam konteks pengangkatan kerabat. Zega et al. (2025) mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, dan menemukan

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

bahwa proses seleksi masih menghadapi berbagai kendala. Kedua penelitian sama-sama mengarahkan perhatian pada dimensi sosial dan tata kelola rekrutmen. Perbedaan fokus penelitian ini terletak pada penelusuran persepsi masyarakat terhadap pengangkatan kerabat kepala desa sebagai aparatur dan keterbukaan proses rekrutmen di Desa Tanjungtiga.

Kekerabatan dapat dipahami sebagai jaringan hubungan sosial yang membentuk kedekatan, tanggung jawab, dan harapan timbal balik di dalam komunitas. Tinjauan hkbar et al. (2025) menjelaskan bahwa persekutuan hukum adat mencakup ikatan kekerabatan, ketetanggaan, dan organisasi, dengan kepentingan pribadi yang dipertimbangkan bersama nilai kolektif. Gagasan tersebut membantu membaca kekerabatan bukan semata-mata sebagai hubungan biologis, melainkan sebagai bagian dari susunan sosial yang dapat memengaruhi tindakan dan penilaian warga. Dalam pemerintahan desa, kedekatan keluarga mungkin memudahkan koordinasi atau membangun kepercayaan, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan ketika akses jabatan dinilai tidak setara. Kemungkinan-kemungkinan itu perlu diperlakukan sebagai pertanyaan empiris, bukan kesimpulan awal. Kerangka tersebut mengarahkan penelitian untuk memeriksa makna kekerabatan dari sudut pandang mantan kepala desa dan masyarakat terkait pengangkatan kerabat.

Kinerja pelayanan dalam penelitian ini dipahami melalui praktik yang tampak dalam interaksi antara aparat desa dan warga, seperti pelaksanaan tugas, komunikasi, ketanggapan, serta perlakuan terhadap kebutuhan pelayanan. Muhi (2024) menemukan bahwa rekrutmen perangkat desa sering dipengaruhi faktor politik dan personal kepala desa, dan faktor tersebut menjadi salah satu penyebab perangkat desa mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak langsung. Temuan itu menandai kaitan tata kelola pengangkatan dengan keberlangsungan kerja, tetapi belum memberikan penjelasan rinci mengenai cara hubungan kekerabatan memengaruhi pengalaman pelayanan di tingkat lokal. Zega et al. (2025) menguraikan hambatan seleksi dan pengawasan, namun fokus penelitiannya berada pada evaluasi kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses dan makna yang menghubungkan relasi keluarga dengan pengangkatan aparatur desa, tanpa mengasumsikan bahwa hubungan tersebut selalu menghasilkan dampak yang sama.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum terjelaskannya mekanisme sosial yang menghubungkan kekerabatan dalam susunan perangkat dengan penilaian warga terhadap pengangkatan tersebut. Studi terdahulu telah membahas pengaruh faktor personal dan politik dalam rekrutmen serta hambatan transparansi dan pengawasan, tetapi abstraknya tidak menguraikan secara khusus persepsi masyarakat terhadap pengangkatan kerabat kepala desa. Konteks Tanjungtiga memungkinkan pemeriksaan atas bagaimana pengangkatan anak dan keponakan kepala desa serta keterbukaan rekrutmen dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengambilan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 5 orang informan selama periode Agustus, September, dan Oktober. Pertanyaan penelitian pertama ialah: Bagaimana mantan kepala

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

desa dan masyarakat memaknai pengangkatan anak dan keponakan kepala desa sebagai aparatur Desa Tanjungtiga?

Pertanyaan kedua ialah: Bagaimana masyarakat menilai keterbukaan rekrutmen aparatur Desa Tanjungtiga? Penelitian ini bertujuan menjawab kedua pertanyaan melalui pendekatan kualitatif yang menempatkan pengalaman dan penafsiran informan sebagai sumber pemahaman.

Kebaruan penelitian ini bersifat empiris-konseptual, yakni menelaah keterkaitan antara pengangkatan anak dan keponakan kepala desa sebagai aparatur desa dengan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan rekrutmen dalam satu konteks pemerintahan desa. Berbeda dari Muhi (2024) yang menekankan dinamika rekrutmen dan Zega et al. yang mengevaluasi proses seleksi serta kepatuhan regulasi, penelitian ini berfokus pada pemaknaan dan penilaian masyarakat terhadap pengangkatan kerabat. Kebaruan itu tidak dimaknai sebagai bukti bahwa kekerabatan menyebabkan penurunan atau peningkatan kinerja, melainkan sebagai pembacaan proses yang terbuka terhadap beragam temuan lapangan. Penelitian ini berkontribusi dalam dua hal. Pertama, secara akademik, penelitian ini memperluas pembahasan rekrutmen perangkat desa dengan mengaitkan relasi kekerabatan dan persepsi masyarakat melalui perspektif pengalaman sosial. Kedua, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat keterbukaan, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan pelayanan tanpa mengabaikan konteks sosial setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk memahami pengangkatan perangkat desa dalam konteks sosial Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Desain tersebut dipilih karena kajian berfokus pada satu kasus pemerintahan desa, termasuk proses pengangkatan, relasi sosial, dan pengalaman pelayanan di lokasi tertentu. Pendekatan kualitatif membantu peneliti menafsirkan makna hubungan kekerabatan menurut perangkat desa dan warga, bukan mengukur pengaruhnya secara statistik (Creswell, 2017). Fokus penelitian ini adalah pengangkatan anak dan keponakan kepala desa sebagai aparatur serta persepsi masyarakat tentang keterbukaan rekrutmen. Data kualitatif yang tersedia mendukung deskripsi terbatas mengenai pengangkatan kerabat sebagai aparatur desa.

Penelitian ini mengidentifikasi pernyataan dari seorang mantan kepala desa dan masyarakat secara umum mengenai fenomena tersebut. Data yang terkumpul diperoleh melalui wawancara dan berlangsung pada bulan Agustus, September, serta Oktober. Keterangan yang tersedia hanya berupa dua pernyataan dari informan yang dikaitkan dengan mantan kepala desa dan masyarakat, sehingga observasi pelayanan, penelaahan dokumen, klarifikasi kepada informan, maupun jejak audit tidak dapat dikonfirmasi dalam bahan yang ada. Peneliti tetap mengumpulkan data dengan wawancara

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

mendalam untuk menggali pengalaman informan mengenai pengisian jabatan, pelaksanaan pekerjaan, dan interaksi dalam pelayanan.

Peneliti menganalisis data secara manual dengan membaca catatan dan transkrip wawancara berulang kali, lalu melakukan pengodean awal, kategorisasi, dan perumusan tema. Penanda awal seperti "akses jabatan", "pembagian tugas", dan "pengalaman layanan" ditinjau kembali agar tetap selaras dengan isi pernyataan informan. Peneliti menjaga keterlacakan keputusan analitis melalui penandaan warna pada transkrip dan pencatatan kode di lembar kerja, kemudian memeriksa kesesuaian kode dengan kutipan terkait. Keterangan yang menyimpang dari pola utama tetap dicatat sebagai kasus pembanding, bukan dihilangkan demi menyederhanakan hasil. Triangulasi data, klarifikasi rangkuman keterangan kepada informan, serta pencatatan tahapan pengumpulan dan analisis sebagai jejak audit digunakan untuk menjaga keabsahan data. Peneliti menyajikan konteks penelitian secukupnya agar pembaca dapat menilai keteralihan temuan, sekaligus merefleksikan asumsi awal untuk membatasi keberpihakan dalam penafsiran (Sugiyono, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Gambaran Umum

Desa Tanjungtiga berada di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, dan menjadi lokasi kajian mengenai pengangkatan perangkat desa serta hubungan kekerabatan. Fokus hasil penelitian terbatas pada keterangan tentang pengangkatan anak dan keponakan kepala desa serta penilaian masyarakat terhadap keterbukaan rekrutmen. Susunan jabatan yang disebut dalam konteks penelitian mencakup sekretaris desa yang merupakan anak kepala desa dan bendahara desa yang merupakan keponakannya. Keterangan mantan kepala desa menyebut jabatan sekretaris desa dan kaur keuangan sebagai posisi yang diisi oleh kerabat tersebut. Penyebutan kaur keuangan dalam wawancara dan bendahara dalam uraian konteks tidak sepenuhnya seragam. Kedua istilah tersebut dipertahankan sesuai sumber keterangannya tanpa menyimpulkan bahwa keduanya pasti merujuk pada jabatan yang sama.

Bahan hasil yang dianalisis berasal dari dua keterangan, yakni mantan kepala desa dan seorang anggota masyarakat. Kode AKD digunakan untuk keterangan mantan kepala desa, sedangkan kode M digunakan untuk keterangan masyarakat. Kode tersebut membedakan sumber pernyataan dan tidak menambahkan identitas pribadi informan. Kedua keterangan menyoroti pengangkatan kerabat, tetapi memberikan penekanan yang berbeda. Mantan kepala desa menyampaikan susunan kerabat pada jabatan tertentu, sedangkan masyarakat menilai proses rekrutmen kurang terbuka. Data tersebut menjadi dasar bagi dua tema hasil yang dijabarkan berikut.

AKD menyatakan, "kepala desa tanjungtiga yang sekarang mengangkat anak dan keponakannya sebagai aparatur desa sebagai sekretaris desa dan kaur keuangan". Kutipan ini

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

mengidentifikasi hubungan keluarga serta jabatan yang disebut dalam keterangan mantan kepala desa. Dengan demikian, gambaran umum penelitian bertumpu pada pengangkatan kerabat dalam susunan perangkat desa.

2 Pengangkatan Kerabat dalam Susunan Perangkat

Mantan kepala desa mengaitkan pengisian jabatan perangkat dengan hubungan keluarga kepala desa yang sedang menjabat. Pernyataan tersebut secara langsung menyebut anak dan keponakan sebagai aparatur, sekaligus menghubungkan mereka dengan jabatan sekretaris desa dan kaur keuangan. Keterangan itu memberikan bukti mengenai keberadaan hubungan kekerabatan dalam susunan perangkat desa. Pernyataan tersebut belum menguraikan tahapan seleksi, persyaratan jabatan, atau pertimbangan yang digunakan saat pengangkatan. Hasil pada tema ini menunjukkan susunan kekerabatan, bukan penilaian atas sah atau tidaknya proses pengangkatan.

Keterangan masyarakat menguatkan adanya pengangkatan kerabat, meskipun disampaikan melalui penilaian terhadap keterbukaan proses. M menyatakan, “Kepala Desa tanjungtiga kurang terbuka dalam merekrut aparatur desa, karena mengangkat anak dan keponakan sebagai aparatur”. Kesamaan pokok tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kekerabatan menjadi bagian yang menonjol dalam pemaknaan kedua informan. Perbedaan terletak pada sudut pandang: AKD menyebut posisi yang diisi, sedangkan M menautkan hubungan keluarga dengan penilaian tentang keterbukaan rekrutmen. Kedua keterangan belum menjelaskan apakah terdapat calon lain, proses pembandingan kemampuan, ataupun mekanisme pengawasan dalam pengisian jabatan.

3 Persepsi tentang Keterbukaan Rekrutmen

Penilaian masyarakat terhadap rekrutmen berpusat pada anggapan bahwa proses pengisian perangkat desa kurang terbuka. Pernyataan M menyebut pengangkatan anak dan keponakan sebagai alasan yang mendasari penilaian tersebut. Keterbukaan dalam hasil penelitian ini tampil sebagai persepsi informan, bukan sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen atau pengamatan proses seleksi. Keterangan mantan kepala desa menyebut kerabat yang diangkat, tetapi tidak secara langsung menjelaskan apakah proses tersebut diumumkan atau melibatkan masyarakat. Perbedaan cakupan keterangan itu membatasi pembacaan mengenai keterbukaan pada penilaian yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Hasil ini tidak menetapkan bahwa rekrutmen berlangsung tertutup secara prosedural, melainkan mencatat adanya persepsi kurang terbuka yang berhubungan dengan pengangkatan kerabat.

Pernyataan ini secara langsung menghubungkan pengangkatan anak dan keponakan dengan penilaian kurang terbuka. Maknanya bagi temuan adalah bahwa keterbukaan rekrutmen tercermin sebagai persepsi masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekerabatan tersebut.

Keterkaitan antara kekerabatan dan persepsi keterbukaan tampak melalui alasan yang dinyatakan langsung oleh informan masyarakat. Hubungan keluarga menjadi dasar penilaian M

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

terhadap proses rekrutmen, sementara mantan kepala desa memberikan keterangan yang mengonfirmasi pengangkatan anak dan keponakan. Keselarasan tersebut mendukung temuan bahwa susunan keluarga dan penilaian atas keterbukaan hadir bersamaan dalam kedua keterangan. Kedua pernyataan tidak menerangkan bagaimana warga memperoleh informasi mengenai proses pengangkatan atau bagaimana kepala desa menjelaskan dasar pemilihannya. Keterangan yang tersedia juga tidak memuat uraian tentang pengalaman warga ketika mengakses layanan administrasi desa. Hubungan antara persepsi keterbukaan dan pengalaman pelayanan belum dapat dijelaskan sebagai pola empiris dalam hasil penelitian ini.

4 Batas Temuan mengenai Kinerja Pelayanan

Kedua keterangan memberikan informasi tentang pengangkatan kerabat dan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan rekrutmen. Tidak ada pernyataan informan yang menguraikan pelaksanaan tugas sekretaris desa atau kaur keuangan secara terperinci. Informan juga tidak menyampaikan contoh mengenai kecepatan pelayanan, ketanggapan aparat, perlakuan terhadap warga, atau penyelesaian urusan administrasi. Kinerja pelayanan karena itu belum dapat dinyatakan meningkat ataupun menurun berdasarkan hasil yang tercatat. Batas tersebut penting agar keberadaan hubungan keluarga tidak diperlakukan sebagai bukti langsung mengenai mutu kerja perangkat desa. Hasil penelitian ini hanya mendukung kesimpulan deskriptif tentang pengangkatan kerabat dan persepsi kurang terbuka, sedangkan penilaian kinerja memerlukan keterangan empiris yang secara khusus membahas pengalaman pelayanan.

Temuan ini dapat dibaca melalui pembedaan antara kedekatan sosial sebagai fakta relasional dan nepotisme sebagai penilaian atas proses pengisian jabatan. Informasi bahwa pejabat yang diangkat merupakan anak atau keponakan kepala desa menunjukkan relasi keluarga, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kompetensi diabaikan atau prosedur dilanggar. Untuk menilai persoalan tersebut, perhatian analitis perlu diarahkan pada bagaimana persyaratan jabatan ditetapkan, bagaimana kelayakan calon dibandingkan, dan apakah alasan pemilihan dapat dipertanggungjawabkan. Pembedaan ini mencegah hubungan keluarga diperlakukan sebagai bukti tunggal tentang ketidakadilan, sekaligus mempertahankan pertanyaan mengenai dasar pengambilan keputusan. Persoalan yang muncul bukan hanya siapa yang mengisi jabatan, melainkan juga keterlacakan alasan yang mendasari penetapan pejabat.

Dalam penelitian lain mengenai rekrutmen perangkat desa, Muhi menemukan bahwa faktor personal dan politik kepala desa dapat mendorong seleksi informal yang mengutamakan kekeluargaan atau loyalitas serta kurang transparan (Muhi, 2024). Temuan tersebut memberi konteks pembanding bagi kasus Tanjungtiga, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa mekanisme atau akibat yang sama berlangsung di desa ini. Secara analitis, perbandingan itu mengarahkan perhatian pada perbedaan antara hasil pengangkatan dan tata cara yang menghasilkan keputusan: susunan kerabat merupakan hasil yang teridentifikasi, sedangkan mekanisme seleksi

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

tetap belum terjelaskan. Pemeriksaan lebih lanjut atas pengumuman lowongan, persyaratan, pembandingan calon, dan dokumentasi keputusan dapat membantu membedakan pengangkatan yang dapat dipertanggungjawabkan dari proses yang hanya dipersepsikan tidak terbuka. Arah pemeriksaan tersebut juga menjaga agar penilaian atas tata kelola tidak bertumpu semata-mata pada identitas keluarga pejabat.

PEMBAHASAN

1 Kekerabatan dalam Pengangkatan dan Dinamika Kerja

Rumusan pertama menelaah hubungan sistem kekerabatan dengan pengangkatan dan dinamika kerja perangkat Desa Tanjungtiga. Keterangan mantan kepala desa menyebut bahwa "banyak kerabat bahkan anak sendiri menjadi perangkat desa di desa tersebut". Konteks jabatan juga mencatat sekretaris desa sebagai anak kepala desa dan bendahara sebagai keponakannya. Fakta tersebut memperlihatkan keterhubungan keluarga dalam susunan perangkat, tetapi belum menerangkan proses seleksi, pertimbangan pengangkatan, atau pembagian tugas. Kekerabatan dapat dibaca sebagai konteks sosial yang relevan untuk ditelaah, bukan sebagai bukti pelanggaran maupun penilaian atas kelayakan seseorang.

Konsep kekerabatan sebagai susunan sosial membantu menafsirkan kedekatan keluarga tanpa mereduksinya menjadi hubungan biologis semata. Kajian tentang persekutuan hukum adat menjelaskan bahwa ikatan kekerabatan hidup bersama bentuk hubungan sosial lain dan menempatkan kepentingan pribadi dalam lingkungan nilai kolektif (hkbar et al., 2025). Dalam konteks Tanjungtiga, lensa tersebut mengarahkan perhatian pada kemungkinan harapan timbal balik, kepercayaan, dan kewajiban sosial yang menyertai hubungan keluarga. Keberadaan hubungan tersebut belum menunjukkan bagaimana harapan itu bekerja dalam keputusan pengangkatan. Makna kekerabatan perlu dibedakan dari bukti tentang prosedur formal dan perilaku kerja.

Muhi (2024) menemukan bahwa rekrutmen perangkat desa sering dipengaruhi faktor politik dan personal kepala desa, serta masih kerap didominasi praktik politik di tingkat desa. Temuan itu menyediakan pembanding yang relevan karena menunjukkan jalur bagaimana kedekatan personal dapat masuk ke proses pengisian jabatan. Keterangan mengenai Tanjungtiga hanya memastikan adanya kerabat dalam susunan perangkat, bukan adanya seleksi informal atau dominasi kepentingan keluarga. Perbedaan tersebut penting agar hasil penelitian terdahulu tidak dipindahkan begitu saja menjadi kesimpulan untuk desa ini. Penelitian Tanjungtiga mengarahkan perhatian pada hubungan yang perlu diuji melalui pengalaman para pihak dan dokumen pengangkatan.

Zega et al. (2025) mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa dengan berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, serta melaporkan bahwa proses seleksi masih menghadapi berbagai kendala. Pembanding itu memperluas pembacaan bahwa proses pengangkatan tidak

berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan akses informasi dan kemampuan warga mengawasi prosedur. Meski demikian, hubungan kekerabatan di Tanjungtiga tidak dengan sendirinya membuktikan patronase ataupun lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan. Penjelasan alternatif tetap terbuka, termasuk kemungkinan bahwa pengangkatan berlangsung melalui prosedur yang berlaku dan kerabat memenuhi persyaratan jabatan. Penilaian atas mekanisme tersebut memerlukan penelusuran bukti yang membedakan hubungan keluarga dari alasan resmi pengangkatan.

Dinamika kerja juga belum dapat diturunkan langsung dari susunan keluarga yang diketahui. Hubungan dekat mungkin memudahkan komunikasi dalam koordinasi, tetapi juga berpotensi memunculkan pertanyaan tentang batas kewenangan dan pertanggungjawaban; kedua kemungkinan itu masih berupa arah analisis, bukan temuan tentang praktik Tanjungtiga. Kajian mengenai BUMDes di Indonesia menguraikan keterkaitan struktur politik lokal, kompetensi pengelolaan, dan akuntabilitas kelembagaan, sehingga mengingatkan bahwa konteks lokal dapat berkelindan dengan kapasitas organisasi (Bake et al., 2026). Objek kajian tersebut berbeda dari pengangkatan perangkat desa, sehingga pembandingnya hanya membantu merumuskan perhatian pada akuntabilitas, bukan membuktikan pola serupa. Pembagian tugas dan pengawasan perlu menjadi bukti penentu dalam memahami dinamika kerja.

Kontribusi pembacaan fokus pertama terletak pada pemisahan tiga hal yang sering tercampur, yakni hubungan keluarga, mekanisme pengangkatan, dan pelaksanaan tugas. Fakta susunan perangkat memberi dasar untuk menelaah hubungan tersebut secara empiris, sedangkan kesimpulan tentang kepatuhan atau kompetensi memerlukan bukti tersendiri. Implikasi praktisnya ialah pemerintahan desa dapat memperjelas prosedur seleksi, kriteria jabatan, pembagian tugas, dan jalur pertanggungjawaban secara terbuka. Langkah tersebut relevan tanpa terlebih dahulu menganggap bahwa kekerabatan selalu merugikan tata kelola. Hubungan kekerabatan di Tanjungtiga merupakan konteks penting yang belum cukup untuk menetapkan bagaimana proses pengangkatan berlangsung atau bagaimana hubungan itu membentuk kerja perangkat.

2 Pemaknaan Kekerabatan terhadap Kinerja Pelayanan

Rumusan kedua membahas bagaimana perangkat dan warga memaknai keterkaitan kekerabatan dengan kinerja pelayanan. Pernyataan mantan kepala desa dan susunan jabatan yang melibatkan anak serta keponakan kepala desa menunjukkan bahwa relasi keluarga hadir dalam konteks pemerintahan setempat. Keterangan tersebut tidak memuat penilaian langsung mengenai ketanggapan, komunikasi, perlakuan kepada warga, ataupun penyelesaian urusan administrasi. Belum dapat dinyatakan bahwa kekerabatan meningkatkan atau menurunkan mutu pelayanan. Pembahasan kinerja perlu bertolak dari perilaku pelayanan yang dapat diamati dan pengalaman warga yang menggunakannya.

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Kinerja pelayanan dalam kerangka penelitian ini dipahami melalui pelaksanaan tugas, komunikasi, ketanggapan, dan perlakuan terhadap kebutuhan warga. Keempat aspek itu membantu membedakan posisi jabatan dari mutu interaksi yang berlangsung ketika pelayanan diberikan. Hubungan keluarga dapat menjadi konteks dalam interaksi, tetapi dampaknya bergantung pada praktik yang benar-benar dialami warga dan cara perangkat menjalankan tanggung jawabnya. Kajian tentang persekutuan hukum adat menelaah hubungan antara individu dan komunitas adat serta bagaimana kepentingan pribadi dipertimbangkan bersama nilai komunal dan sosial (hkbar et al., 2025). Tafsir demikian tetap perlu diuji melalui pengalaman beragam pihak, bukan disimpulkan dari susunan keluarga saja.

Kajian Sukmi et al. (2025) menemukan hubungan positif antara kepemimpinan kepala desa dan efektivitas pelayanan pada konteks desa yang diteliti melalui pendekatan kuantitatif. Temuan tersebut menggarisbawahi bahwa pembacaan pelayanan dapat mencakup pengaruh pengelolaan dan kepemimpinan, bukan hanya karakteristik individu petugas. Penelitian itu tidak secara khusus menelaah kekerabatan dalam susunan perangkat, sehingga tidak dapat dijadikan bukti bahwa hubungan keluarga menentukan pelayanan di Tanjungtiga. Perbandingan ini memperluas fokus analisis kepada praktik kepemimpinan dan pengaturan kerja sebagai konteks yang mungkin berhubungan dengan pengalaman warga. Kesimpulan lokal tetap harus bersandar pada keterangan pelayanan yang dialami informan.

Hamam et al. (2026) menganalisis pengaruh manajemen dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja birokrasi pemerintah desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, melalui penelitian kuantitatif. Hasil tersebut memberi pembanding bahwa kinerja organisasi desa dapat dibahas melalui tata kelola kerja, bukan semata-mata melalui latar hubungan antarpegawai. Perbedaan pendekatan dan fokus membatasi pemindahan hasilnya ke kasus Tanjungtiga, terutama karena pertanyaan penelitian ini menyangkut pemaknaan sosial atas kekerabatan. Pembacaan yang berhati-hati mengarahkan perhatian pada kemungkinan bahwa pengaruh relasi keluarga, bila dialami, dimediasi oleh pembagian tugas, arahan kerja, dan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut belum dapat dipastikan tanpa bukti yang menghubungkan pengalaman pelayanan dengan pengaturan kerja.

Pemaknaan warga dapat memuat ketegangan antara kepercayaan kepada orang yang dikenal dan tuntutan perlakuan setara dalam pelayanan. Kedekatan sosial mungkin dipersepsi sebagai kemudahan komunikasi, sedangkan dugaan perlakuan berbeda dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan; keduanya merupakan kemungkinan penafsiran, bukan kesimpulan yang telah terbukti di desa ini. Perbedaan pengalaman antarwarga juga dapat muncul karena kebutuhan layanan dan interaksi dengan petugas tidak selalu sama. Analisis karena itu perlu membedakan persepsi tentang hubungan keluarga dari bukti perlakuan aktual dalam proses pelayanan. Kasus yang tidak sesuai dengan pola umum perlu dipertahankan sebagai pembanding, bukan diabaikan demi kesimpulan yang seragam.

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

Sumbangan konseptual fokus kedua ialah menempatkan kinerja pelayanan sebagai pengalaman interaksi yang perlu ditelaah bersama konteks kekerabatan, bukan sebagai akibat otomatis dari susunan keluarga. Sumbangan itu memperluas pembahasan rekrutmen dengan mengarahkan perhatian pada bagaimana warga dan perangkat memaknai pelaksanaan pelayanan setelah pengangkatan. Secara praktis, keterbukaan informasi, prosedur layanan yang konsisten, dan mekanisme pengaduan dapat membantu warga menilai pelayanan berdasarkan tindakan yang dialami. Bukti yang tersedia belum membenarkan penilaian mengenai arah pengaruh kekerabatan terhadap kinerja pelayanan. Kesimpulannya, hubungan keluarga merupakan konteks analitis yang relevan, sedangkan makna dan kaitannya dengan mutu pelayanan harus ditetapkan melalui pengalaman konkret warga serta praktik kerja perangkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Keterangan mantan kepala desa menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan hadir dalam pengisian perangkat Desa Tanjungtiga, termasuk keterlibatan anak dan kerabat kepala desa. Susunan jabatan yang diketahui mencakup sekretaris desa yang merupakan anak kepala desa serta bendahara desa yang merupakan keponakannya. Fakta tersebut memperlihatkan keterkaitan keluarga dengan susunan perangkat desa pada konteks setempat, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan tahapan pengangkatan, dasar pertimbangan pemilihan, keterbukaan proses, ataupun kesesuaian setiap pengangkatan dengan ketentuan yang berlaku. Keterangan itu juga belum menunjukkan bahwa hubungan keluarga menentukan kompetensi, pembagian tugas, pertanggungjawaban, atau dinamika kerja perangkat. Kesimpulan mengenai fokus pertama terbatas pada keberadaan relasi kekerabatan dalam susunan jabatan, bukan penilaian atas prosedur maupun mutu pelaksanaannya.
2. Keterkaitan sistem kekerabatan dengan kinerja pelayanan belum dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia mengenai susunan keluarga perangkat desa. Belum ada dasar empiris yang cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungan tersebut meningkatkan atau menurunkan pelaksanaan tugas, komunikasi, ketanggapan, maupun perlakuan terhadap kebutuhan warga. Kekerabatan dalam konteks ini dapat dinyatakan sebagai ciri sosial susunan perangkat, sedangkan konsekuensinya bagi pengalaman pelayanan tetap belum terjelaskan. Kesimpulan penelitian tidak menempatkan hubungan keluarga sebagai bukti otomatis adanya perlakuan istimewa, ketidakadilan, ataupun pelayanan yang buruk. Jawaban atas fokus kedua terbatas pada pengakuan bahwa relasi kekerabatan hadir dalam konteks pemerintahan desa, sementara makna dan kaitannya dengan pengalaman pelayanan warga belum dapat ditetapkan.

NUQUD: Journal of Islamic Economics and Finance
Volume 1, Nomor 1 (2026) E-ISSN : XXX-XXXX

DAFTAR PUSTAKA

Bake, Jamal, Taufik, Yani, Malik, Bakti, & Wahbi, Akbar (2026). Institutional failure and the shadow of local elites: a multi-case study of problematic village enterprises in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *12*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2724158

Creswell, John W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.

Hamam, Achmad, Setiawan, Ady, & Jondar, Aloysius (2026). Dinamika gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja birokrasi desa. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *6*(1), 155–172. https://doi.org/10.60036/jbm.876

hkbar, Mohammad hikmal, Muhammad, Lubabin Nawval, & Faridillah, Najwa (2025). Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetanggaan, dan Keorganisasian. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, *3*(02), 131–141. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.462

Muhi, Ali Hanafiah (2024). Dinamika Rekrutmen Perangkat Desa Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *9*(2), 125–141. https://doi.org/10.33701/jipsk.v9i2.4854

Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv.

Sukmi, Mulyadi & Erlian Dwisnu (2025). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektifitas Pelayanan Pada Masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Stia Bengkulu Committe to Administration for Education Quality*, *11*(1), 111–122. https://doi.org/10.56135/jsb.v11i1.222

Zega, Evi Pebriani, Ndraha, Ayler Beniah, Telaumbanua, Aferiaman, & Telaumbanua, Eliagus (2025). Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(1), 188–202. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1051